

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)**

Denis Setiawan¹, Andri Widiyanto², Yusri Anis F³

¹ Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Korespondensi email: dnzmnn@gmail.com

ABSTRAK

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, keserasian dan pertumbuhan pendapatan daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Rasio keserasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 14,10%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 12,45% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,27%. Rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 2,41%, selanjutnya rasio ketergantungan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 3,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 2,01%. Rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Tegal tahun 2018-2020 memiliki nilai tahun 2018 sebesar -1,75% tahun 2019 sebesar -2,55%; tahun 2020 sebesar 12%.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio

Financial Ratio Analysis to Assess the Financial Performance of the Tegal City Government.

ABSTRACT

Financial ratio analysis is a comparison between two numbers whose data is taken from financial statements that are used to interpret performance developments from year to year. To find out the financial performance of the Tegal City Government for the 2018-2020 fiscal year when viewed from the ratio of regional financial independence, compatibility and revenue growth area. The data analysis technique in this research is descriptive quantitative. The results of the study show that the capital expenditure compatibility ratio in 2018 was 14.10%, in 2019 it decreased by a total of 12.45% and in 2020 it increased by 14.27%. The independence ratio in 2018 was 2.41%, then the 2019 ratio increased by 3.32% and in 2020 it decreased by 2.01%. The growth ratio generated by the City of Tegal in 2018-2020 has a 2018 value of -1.75% in 2019 of -2.55%; in 2020 by 12%.

Keywords: *Financial Statements, Financial Performance, Ratio Analysis*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nugraha, 2019) ^[1]. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, pemerintah menyusun APBN atau APBD.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat lebih umum dan sederhana agar mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan

keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda. Padahal semua pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019) ^[2].

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD, pemerintah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur Rasio Kemandirian Daerah, Keresasian, dan Pertumbuhan daerah, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat mengetahui pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007) ^[3].

ketergantungan pemerintah daerah Kota Tegal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, selama kurun waktu 2018-2020 pendapatan transfer selalu mengalami peningkatan (2) rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga penerimaan pendapatan asli daerah relatif rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Maka penulis mengambil topik penelitian dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)”

Perumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah? Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan? Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio keserasian belanja modal?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio pertumbuhan. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio keserasian belanja modal.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian berlokasi di Kota Tegal.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan Juli 2021

Objek Penelitian

Penulis memfokuskan objek penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk

Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 sampai 2020.

Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk lisan atau tulisan. (Sugiyono, 2007:13).^[13] Data tersebut dalam penelitian ini adalah Data pada Peraturan Walikota Tegal tentang informasi mengenai Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.
- b) Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau data yang di angkakan. (Sugiyono, 2007: 13).^[13] Data tersebut dalam penelitian ini adalah data pada Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara penulis lakukan dalam pengumpulan data yaitu :

- 1) Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data laporan Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 sampai 2020.
- 2) Studi Pustaka
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literature tugas akhir sebelumnya, dan

buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal, penulis menggunakan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Keserasian, Dan Rasio Pertumbuhan yaitu:

1. Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007: 13).^[13]

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 4 berasal dari sumber yang lain (Mahmudi, 2019:140)^[14] .. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Dan Pinjaman}} \times 100\% \dots$$

Tabel 3.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	4. Rasio Pertumbuhan Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif dan meningkatkan telah dicapai dari
Rendah	25%-50%	
Sedang	50%-75%	
Tinggi	75%-100%	

a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada

kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Mahmudi, 2019:162-163)^[15]

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots$$

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2012)^[16] . Diketuainya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-

potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Analisis Data

1.2. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai seberapa besar Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Maka dapat dihitung Rasio Kemandirian daerah yang ideal. Adapun rumus Rasio Kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018
Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.305.484.446.000}}{\text{Rp.126.438.028.000}} \times 100\% = 2,41\%$$

2. Tahun 2019
Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.297.677.322.000}}{\text{Rp.89.565.746.000}} \times 100\% = 3,32\%$$

3. Tahun 2020
Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.333.012.742.000}}{\text{Rp.165.060.342.000}} \times 100\% = 2,01\%$$

Hasil Perhitungan Rasio Keserasian

Maka dapat dihitung Keserasian belanja daerah yang ideal. Adapun rumus Keserasian:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018
Rasio Keserasian = $\frac{\text{Rp.161.022.598.000}}{\text{Rp.1.140.134.132.000}} \times 100\% = 14,10\%$

2. Tahun 2019
Rasio Keserasian = $\frac{\text{Rp.139.595.083.000}}{\text{Rp.1.120.465.803.000}} \times 100\% = 12,45\%$

3. Tahun 2020
Rasio Keserasian = $\frac{\text{Rp.182.439.678.000}}{\text{Rp.1.278.393.100.000}} \times 100\% = 14,27\%$

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Maka dapat dihitung Rasio Pertumbuhan daerah yang ideal. Adapun rumus Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018

$$\begin{aligned} & \textbf{Rasio Pertumbuhan} \\ & = \frac{\text{Rp.305.484.446.000} - \text{Rp.310.927.508.000}}{\text{Rp.310.927.508.000}} \times 100\% \\ & = -1,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{2. Tahun 2019} \\ & \textbf{Rasio Pertumbuhan} = \\ & = \frac{\text{Rp.297.677.322.000} - \text{Rp.305.484.446.000}}{\text{Rp.305.484.446.000}} \times 100\% \\ & = -2,55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{3. Tahun 2020} \\ & \textbf{Rasio Pertumbuhan} = \\ & = \frac{\text{Rp.333.012.742.000} - \text{Rp.297.677.322.000}}{\text{Rp.297.677.322.000}} \times 100\% \\ & = 12\% \end{aligned}$$

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya.

1. Rasio keserasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 14,10%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 12,45% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,27%. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
2. Rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 2,41%, selanjutnya tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 3,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 2,01%. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah
3. Rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Tegal tahun 2018- 2020 memiliki nilai tahun 2018 sebesar -1,75% tahun 2019 sebesar -2,55%; tahun 2020 sebesar 12%. Semakin besar presentase pertumbuhan semakin besar pula pertumbuhan di daerah tersebut. dan semakin kecil presentase pertumbuhannya maka pertumbuhan di daerah tersebut juga kecil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah

1. Pemerintah Kota Tegal diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu meningkatkan kemandirian daerah Kota Tegal.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Tegal lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan meningkatkan belanja modal. Ini dilakukan untuk memperbaiki ketiga rasio.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan ada penambahan periode dan variabel yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Memperluas ruang lingkup Wilayah penelitian agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Provinsi Jawa Tengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan dibuatnya jurnal ini agar dapat dijadikan suatu contoh untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Nugraha, (2019). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jawa Tengah*: TribunJateng.com.
- 2) (Mahmudi, 2019:90). *menganalisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- 3) Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat: Kinerja Keuangan Daerah
- 4) Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* .
- 5) Fahmi (2014:82) *Definisi Growth*.
- 6) Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 7) Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 8) Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 9) Bastian (2006: 147) Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan..
- 10) Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- 11) (Permendagri No.13 Tahun 2006) *rencana keuangan tahunan daerah*.
- 12) Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- 13) Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- 14) Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- 15) Margarita, L. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018. *Skripsi* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal.

